PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

RENCANA STRATEGIS 2025-2029

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan adalah perangkat daerah Kabupaten Nunukan yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah.

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten dan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, yang dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 dan bersifat indikatif.

Demi menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional, pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan diselaraskan dengan memperhatikan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2029.

Bahwa penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 berpedoman pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, yang penyusunannya melalui tahapan: persiapan penyusunan; penyusunan rancangan awal; pelaksanaan forum perangkat daerah; perumusan rancangan akhir; dan penetapan.

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 setelah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Nunukan.

1.2. Pengertian Renstra DSP3A Kabupaten Nunukan

Rencana Strategis berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan mempertimbangkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul di masa mendatang. Rencana strategis memuat tujuan, sasaran, serta capaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika kebutuhan pelayanan publik.

Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Dokumen ini disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Nunukan dan bersifat indikatif.

Berdasarkan pengertian tersebut, Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Nunukan merupakan dokumen perencanaan untuk periode

lima (5) tahun yang memuat strategi, kebijakan, program, serta indikasi kegiatan pembangunan. Penyusunan Renstra DSP3A berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah DSP3A yang selaras dengan strategi dan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

DSP3A mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Dalam Renstra DSP3A dijabarkan secara rinci daftar program dan kegiatan, serta ditetapkan tolok ukur kinerja yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan tahunan maupun lima tahunan.

Tahapan Penyusunan Renstra DSP3A

1. Persiapan penyusunan Renstra DSP3A;
2. Penyusunan Rancangan Renstra DSP3A;
3. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra DSP3A;
4. Penetapan Renstra DSP3A.

Renstra DSP3A Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi DSP3A. Penyusunan Renstra ini berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029.

Hubungan antara dokumen Rencana Strategis DSP3A Tahun 2025–2029 dengan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 adalah bahwa Renstra DSP3A menjadi salah satu dokumen teknis operasional dan penjabaran teknis dari RPJMD. Renstra ini memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta indikasi rencana program pembangunan lima tahunan, yang mencakup program internal DSP3A, program lintas Perangkat Daerah, serta program lintas wilayah.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dalam sistem perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

(Gambar 1.1 Keterkaitan Dokumen Renstra DPUPR Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya)

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang dilakukan sebagai respons terhadap dinamika lingkungan strategis, perubahan regulasi, maupun kebutuhan organisasi. Perubahan Renstra merupakan hal yang wajar serta diperlukan agar rencana yang telah ditetapkan tetap relevan dan efektif dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Proses perubahan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait, serta didasarkan pada analisis mendalam agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan dilaksanakan secara optimal. Perubahan Renstra dilakukan untuk mengakomodasi perkembangan kondisi eksisting maupun prediksi ke depan yang disebabkan oleh, antara lain:

- Anomali kebijakan fiskal;
- Perubahan struktur dan tata kerja organisasi perangkat daerah.

Perubahan kondisi eksisting yang dihadapi umumnya bersumber dari anomali kebijakan fiskal pemerintah pusat, yang dapat mengakibatkan defisit pembiayaan dan pergeseran orientasi prioritas pembangunan. Defisit pembiayaan dimaksud adalah keterbatasan kemampuan

pemerintah daerah dalam merealisasikan pembayaran atas program atau kegiatan yang telah dianggarkan.

Sebagai akibat dari anomali kebijakan fiskal, orientasi prioritas pembangunan bergeser dari “apa yang harus dicapai” menjadi “apa yang dapat dicapai”. Penyesuaian tersebut merupakan langkah yang realistis, mengingat kemampuan keuangan daerah tidak selalu memadai untuk memenuhi seluruh target pembangunan sebagaimana ditetapkan sebelumnya.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
19. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025–2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-0889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017–2037;
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018–2038;
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang RPJPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025–2045;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nunukan Tahun 2024–2043;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 Tahun 2024 tentang RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2045;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029;
31. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.

1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan anak selama 5 (lima) tahun ke depan, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 dan bersifat indikatif**.**

1.4.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak selama 5 (lima) tahun ke depan;
b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025–2029;
c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Nunukan sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala;

d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan.

1.5. Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang penyusunan Renstra, pengertian Renstra DSP3A Kabupaten Nunukan, serta keterkaitannya dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah maupun nasional. Pada bagian ini juga dipaparkan landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan, maksud dan tujuan yang ingin dicapai, serta gambaran mengenai sistematika dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memberikan gambaran pelayanan, permasalahan, dan isu strategis perangkat daerah. Uraian ini mencakup tugas, fungsi, dan struktur organisasi DSP3A, sumber daya yang tersedia, serta kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan. Selain itu, disajikan pula kelompok sasaran layanan, tantangan dan peluang pengembangan, serta identifikasi permasalahan dan isu strategis yang akan memengaruhi arah kebijakan pada periode perencanaan.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan DSP3A. Dalam bab ini dijelaskan rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah yang hendak dicapai, disertai strategi dan arah kebijakan yang disusun untuk menjawab permasalahan dan isu strategis. Seluruh tujuan dan sasaran tersebut dirancang agar selaras dengan visi, misi, serta arah pembangunan daerah Kabupaten Nunukan.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjabarkan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan DSP3A selama periode 2025–2029. Di dalamnya disertakan uraian mengenai indikator, target capaian, dan pagu indikatif, serta keterkaitan dengan program prioritas pembangunan daerah. Bab ini juga menampilkan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolok ukur penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

BAB V PENUTUP

Berfungsi sebagai penutup yang merangkum substansi pokok Renstra. Bagian ini menegaskan kesimpulan penting, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi perencanaan. Penutup juga menekankan bahwa Renstra DSP3A menjadi pedoman penyusunan rencana kerja tahunan sekaligus instrumen pengendalian agar pembangunan daerah dapat berlangsung konsisten dan selaras dengan kebijakan yang berlaku.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAH DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan dengan struktur organisasi secara lengkap terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat Dinas, yang terdiri dari:
    - Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.
c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
d. Bidang Rehabilitasi Sosial;
e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
g. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
i. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Struktur organisasi tersebut juga dapat didukung oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang akan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau teknis penunjang Dinas khususnya dalam penanganan permasalahan social, perlindungan perempuan dan anak. Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan anak secara lebih jelas adalah sebagai berikut.

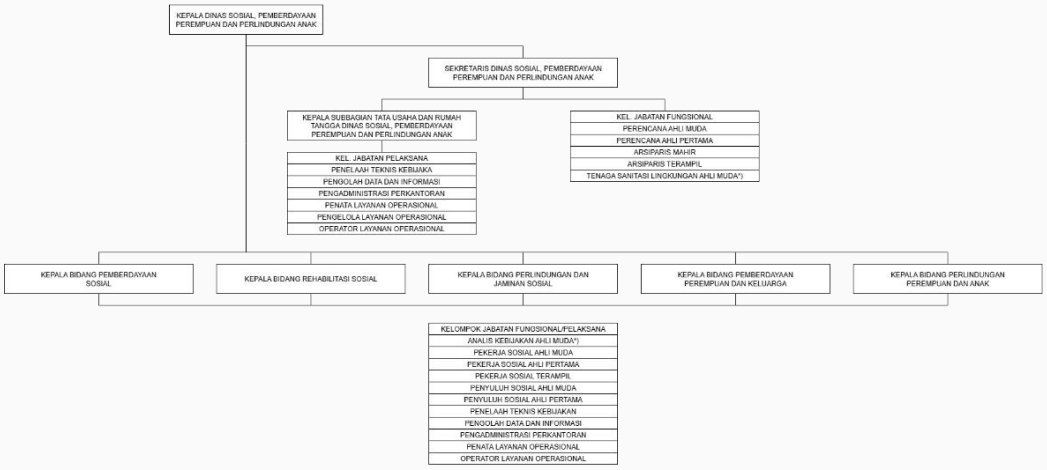

(Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan)

Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, maka Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang sosial dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu oleh:

1. Sekretariat Dinas

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretaris Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan bidang-bidang serta memberikan pelayanan administratif dan pertimbangan teknis kepada seluruh satuan/unit kerja di lingkungan DSP3A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan dinas;
b. pengoordinasian kegiatan yang terdiri dari:
    1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
    2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
    3) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
    4) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
    5) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
    6) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
    7) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
    8) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
    9) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
c. perumusan bahan penyajian data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tugas Dinas;

d. perumusan bahan pembinaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di Lingkungan Dinas;
e. perumusan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di Lingkungan Dinas;
f. pengoordinasian dukungan dan pelayanan administratif serta pertimbangan teknis bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di Lingkungan Dinas;
g. pengoordinasian pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan ganti rugi di Lingkungan Dinas;
h. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
i. pelaksaaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan, melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;

b. perencanaan kegiatan yang terdiri dari:
   1) kegiatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah;
   2) kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah;
   3) kegiatan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah;
   4) kegiatan administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah;
   5) kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah;
   6) kegiatan administrasi umum perangkat daerah;
   7) kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah;
   8) kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah; dan
   9) kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah.
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Pelaksana; dan
d. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

3. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pemberdayaan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di bidang pemberdayaan sosial;
b. pengoordinasian program yang terdiri dari:

1) program pemberdayaan sosial; dan
2) program pengelolaan taman makam pahlawan.

c. pembinaan terhadap kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

4. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Rehabilitasi Sosial;
b. pengoordinasian program yang terdiri dari:
   1) program penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan; dan
   2) program rehabilitasi social.
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
b. pengoordinasian program yang terdiri dari:
   1) program perlindungan dan jaminan sosial; dan
   2) program penanganan bencana.
c. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan teknis dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
b. pengoordinasian program yang terdiri dari:
   1) program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan;
   2) program peningkatan kualitas keluarga; dan
   3) program pengelolaan sistem data gender dan anak.
c. pembinaan terhadap kelompok jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana; dan
d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

7. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyiapkan perencanaan, perumusan kebijakan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dalam Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan bahan kebijakan teknis operasional di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
b. pengoordinasian program yang terdiri dari:
   1) program perlindungan perempuan;
   2) program pemenuhan hak anak (PHA); dan
   3) program perlindungan khusus anak.
c. pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana; dan

d. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

2.1. 2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/organisasi, karena manusia sebagai pelaksana sangat menentukan akan capaian tingkat kinerja atau keberhasilan instansi/organisasi tersebut dalam mencapi tujuannya. Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Nunukan dalam mencapai tujuannya didukung pegawai sebanyak 30 pegawai (orang) berstatus pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan dibantu dengan tenaga honorer atau Non ASN sebanyak 18 orang.

Komposisi pegawai negeri sipil DSP3A Kabuapten Nunukan berdasarkan berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan, serta eselon sebagaimana dalam Tabel 2.1. dan Tabel 2.2. di bawah ini:

No	Pendidikan	Golongan						Jumlah Orang
		I	II	III	IV	V	IX	
1	S-2	-	-	3	3	-	-	6
2	S-1	-	-	12	2	-	4	18
3	Diploma (D-3)	-	-	2	-	-	-	2
4	Diploma (D-2)	-	-	-	-	-	-	-
5	Diploma (D-1)	-	-	-	-	-	-	-
6	SMA	-	1	2	-	1	-	4
7	SMP	-	-	-	-	-	-	-
8	SD	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		**-**	**1**	**19**	**5**	**1**	**4**	**30**

(Tabel 2.1 Komposisi Pegawai DSP3A Kabupaten Nunukan Berdasarkan Pendidikan dan Golongan)

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II b	1
2	Eselon III a	1
3	Eselon III b	5
4	Eselon IV a	1
5	Eselon IV b	-
6	Fungsional	12
7	Non Eselon	10
Jumlah		**30**

(Tabel 2.2 Komposisi Pegawai DSP3A Kabupaten Nunukan Berdasarkan Eselon)

2.1.2.2. Aset/Modal

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Nunukan dapat berjalan secara efektif dan efisien, selain dibutuhkan sumber daya manusia yang yang berkualitas, ditunjang asset/modal yang merupakan sarana dan prasarana untuk bekerja, seperti; meja dan kursi, komputer, laptop, dan printer untuk melaksanakan proses pengerjaan administrasi, lemari dan filling cabinet untuk penyimpanan arsip.

Tersedianya sarana sistem informasi yang berfungsi untuk memudahkan dan mempercepat penyampaian informasi dengan berbagai pihak baik internal DSP3A sendiri, maupun eksternal, seperti ke instansi, lembaga, swasta baik dalam negeri maupun luar negeri, berupa sarana seperti; internet, faxcimille, email, website, telepon.

Tersedianya kantor DSP3A yang memadai, yang didalamnya tersedia sarana aula/ruangan untuk rapat dan koordinasi, ruangan arsip untuk penyimpanan dokumen seperti kontrak pekerjaan, surat pertanggungjawaban, hasil kajian-kajian, dan lainnya, adapun perpustakaan sampai dengan saat ini belum tersedia.

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan anak adalah terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk

menopang operasional rangka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Nunukan. Sarana dimaksud terdiri dari:

No	Jenis Aset	Jumlah	Keterangan
1	Rak Besi	1	Kondisi Baik
2	Filing Cabinet Besi	1	Kondisi Baik
3	White Board	2	Kondisi Baik
4	Tempat Tidur Besi	5	Kondisi Baik
5	Kasur/Spring Bed	6	Kondisi Baik
6	Kursi Rapat	101	Kondisi Baik
7	Kursi Putar	10	Kondisi Baik
8	Kursi Biasa	20	Kondisi Baik
9	Meja Komputer	2	Kondisi Baik
10	Meubeleur lainnya	17	Kondisi Baik
11	Alat Pembersih lainnya	4	Kondisi Baik
12	Kipas Angin	3	Kondisi Baik
13	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Kondisi Baik
14	Tabung Gas	1	Kondisi Baik
15	Alat Dapur lainnya	1	Kondisi Baik
16	Televisi	1	Kondisi Baik
17	Dispenser	2	Kondisi Baik
18	Alat Rumah Tangga Lain-lain	40	Kondisi Baik
19	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3	Kondisi Baik
20	Pesawat Telephone	1	Kondisi Baik
21	Facsimile	1	Kondisi Baik
22	Generator	2	Kondisi Baik
23	Alat peraga praktek sekolah bidang studi : olah raga lainnya (dst)	60	Kondisi Baik
24	Layar Proyektor	1	Kondisi Baik
25	Printer (Peralatan Personal Komputer)	6	Kondisi Baik

(Tabel 2.3 Asset/Modal pada Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan anak Tahun 2025)

2.1.2.3. Sumber Daya Lainnya

Selain sumber daya manusia dan asset/modal sebagai unsur pokok dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, adalah unsur

yang tak kalah penting dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut yaitu sumber daya lainnya antara lain:

No	Jenis SDM	Jumlah	Tugas dan Fungsi
1	Tenaga Psikolog	1 Orang	Sebagai pendamping, konseling dan assessment bagi perempuan dan anak sebagai korban, pelaku dan saksi KDRT maupun diluar Keluarga
2	Pekerja Sosial	4 Orang	Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan social
3	PKH	20 Orang	Tenaga pendamping yang berfungsi melakukan pendamping pada masyarakat kurang mampu pada program keluarga harapan
4	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	30 Orang	Membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan
5	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	232 Orang	Membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat kelurahan
6	TarunaSiaga Bencana (Tagana)	52 Orang	Melaksanakan penanggulangan bencana, baik pada pra bencana, saat tanggap darurat, maupun pascabencana, dan tugas- tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana
7	Pelopor Perdamaian (Pordam)	4 Orang	Meningkatkan Kesadaran dan Pemahaman

s

			masyarakat tentang pentingnya perdamaian dan toleransi

(Tabel 2.4 Tenaga SDM Pendukung DSP3A Kab. Nunukan Tahun 2025)

No	Jenis Sarana	Fungsi	Keterangan
1	Rumah Perlindungan Dan Trauma Center (RPTC)	RPTC merupakan penampungan sementara bagi PPKS sebelum mereka dikembalikan ke daerah asalnya	Milik DSP3A Kab. Nunukan
2	Rumah Selter	Tempat berlindung bagi korban dan saksi sementara selama kasus dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga	Milik DSP3A Kab. Nunukan
3	Kantor PKH	Sekretariat PKH Kab. Nunukan	Sekretariat di DSP3A Kab. Nunukan
4	Gudang Logistik	Gudang tempat menyimpan barang persediaan jika terjadi bencana alam atau social	Pihak ketiga

(Tabel 2.5 Jumlah Sarana Pendukung DSP3A di Kab. Nunukan)

2.1.3. Kinerja Pelayanan DSP3A Kabupaten Nunukan

Pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan anak juga ditunjang oleh tata laksana berupa Standar Operasional Pelayanan (SOP) Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terdapat 8 SOP yang meliputi SOP terkait bidang Linjamsos, Pemberdayaan Sosial, Rehab Sosial dan PPA, SOP tersebut antara lain:

1. SOP Penerbitan Rekomendasi PBI-D
2. Surat Keterangan Terdaftar atau Usulan Dalam Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) /KIP

3. Penyaluran Bantuan Logistik Tanggap Darurat
4. Rekomendasi Pengumpulan Uang Dan Barang (Pub)
5. Prosedur Penyediaan Alat Bantu
6. Prosedur Penerbitan Rekomendasi dan Surat Keterangan Terlantar PPKS
7. Prosedur Reunifikasi PPKS Terlantar
8. Prosedur Rujukan PPKS Terlantar

Untuk mengetahui gambaran kinerja pelayanan tersebut dapat diberikan gambaran pencapaian kinerja pelayanan tahun 2025 – 2029 sebagaimana terinci pada Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan

Visi :	Menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai daerah yang maju dan berkembang
Misi :	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter

Permasalahan Pelayanan	**Faktor**	
	Penghambat	**Pendorong**
Cakupan atau jangkauan pelayanan program kesejahteraan sosial masih sangat terbatas dibandingkan jumlah PSKS yang ditangani.	1. Program pelayanan bagi PMKS yang dilakukan masih tumpang tindih, penerima bantuan sosial dari sebuah program, pada umumnya akan menerima tambahan bantuan melalui program lainnya. 2. Tidak tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai di daerah, khususnya untuk fungsional kesejahteraan Sosial	1. Adanya potensi dan sumber untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial melalui pelayanan sosial bagi PMKS yang dilakukan oleh keluarga dan komunitas / masyarakat, seperti karang taruna, LKS,LK3, PSM,TKSK,Tagana) dan program Corporate Social Responsibility (CSR)
Belum optimalnya proses verifikasi dan validasi data DTSEN	Terbatasnya petugas dan alokasi anggaran dalam verifikasi dan validasi data DTSEN	Adanya Komitmen penentu dan pelaksana kebijakan
• Belum tercapainya proporsi anggota perempuan di lembaga legislatif	• Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender	• Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan • Adanya kerjasama yang baik antara

(Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan)

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran layanan mengacu pada segmen populasi atau kelompok individu yang menjadi target utama penerima layanan atau produk yang diberikan. Mereka adalah kelompok yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan kondisi tertentu yang relevan dengan layanan yang ditawarkan. Dengan kata lain, mereka adalah kelompok yang akan mendapatkan manfaat langsung dari layanan tersebut. Dengan memahami kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah, dapat memberikan beberapa manfaat antara lain:

a. Identifikasi Kebutuhan adalah langkah memahami siapa yang membutuhkan layanan serta merumuskan kebutuhan spesifik dari kelompok sasaran.
b. Penyusunan Program adalah dalam rangka merancang program atau layanan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kelompok sasaran.
c. Efektivitas Layanan adalah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam memberikan layanan, sehingga hasil yang dicapai lebih optimal.
d. Peningkatan Kualitas Hidup adalah dalam rangka membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan layanan dan kegiatan yang sesuai.

Kelompok sasaran layanan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) mencakup masyarakat umum, kelompok rentan, keluarga miskin, penyandang disabilitas, anak, perempuan, lansia, dan kelompok sosial lainnya. DSP3A fokus dalam merencanakan dan melaksanakan program yang berdaya guna dan berhasil guna di bidang sosial, sehingga mereka menjadi sasaran layanan antara lain:

1. **Masyarakat Umum**: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DSP3A) memberikan layanan sosial dasar, bantuan sosial, fasilitasi pemberdayaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum,

khususnya bagi keluarga miskin dan rentan. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperluas akses kesejahteraan.

2. **Perempuan dan Anak**: DSP3A melaksanakan program pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dari kekerasan, perdagangan orang, dan diskriminasi, serta memberikan fasilitas layanan pengaduan, pendampingan, hingga pemulihan korban.
3. **Penyandang Disabilitas dan Lansia**: DSP3A memberikan pendampingan sosial, rehabilitasi, pemberian akses layanan publik, serta memastikan hak-hak dasar disabilitas dan lansia terpenuhi melalui regulasi dan program yang sesuai.
4. **Kelompok Sosial Lainnya**: DSP3A juga menyasar kelompok sosial seperti komunitas adat, kelompok rentan lainnya, dan organisasi sosial yang berperan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Mereka juga memfasilitasi kerja sama lintas sektor untuk memperkuat perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

2.1.5. Tantangan Pengembangan Pelayanan DSP3A

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Nunukan menghadapi beberapa tantangan dalam melaksanakan pelayanan publik, antara lain:

1. Tantangan Pengentasan Kemiskinan dan Bantuan Sosial
    a. Akurasi data penerima manfaat bantuan sosial masih sering bermasalah sehingga menimbulkan ketidakadilan.
    b. Ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial menghambat upaya pemberdayaan ekonomi.
    c. Keterbatasan anggaran membatasi cakupan penerima manfaat dan kualitas program.

d. Jangkauan wilayah terpencil dan kepulauan menyulitkan distribusi bantuan sosial tepat waktu.

2. Tantangan Pemberdayaan Perempuan
   a. Rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan dan pengambilan keputusan publik.
   b. Adanya praktik diskriminasi gender di masyarakat, termasuk di dunia kerja.
   c. Keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan teknologi.
   d. Minimnya program pelatihan dan pemberdayaan yang berkelanjutan.
3. Tantangan Perlindungan Anak
   a. Masih adanya kasus kekerasan fisik, psikis, seksual, dan eksploitasi anak.
   b. Kurangnya fasilitas layanan perlindungan dan rehabilitasi anak di daerah terpencil.
   c. Rendahnya kesadaran orang tua dan masyarakat tentang hak-hak anak.
   d. Belum optimalnya sistem pelaporan, pendampingan, dan penanganan korban anak.
4. Tantangan Penanganan Penyandang Disabilitas dan Lansia
   a. Minimnya aksesibilitas fasilitas publik bagi penyandang disabilitas dan lansia.
   b. Kurangnya tenaga pendamping dan layanan sosial khusus.
   c. Keterbatasan program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas.
   d. Perlunya sinergi lintas sektor dalam memberikan layanan perlindungan sosial.
5. Tantangan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Sosial
   a. Lemahnya kapasitas kelembagaan organisasi sosial dan relawan di tingkat desa/kelurahan.
   b. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan.

c. Keterbatasan pendanaan untuk mendukung inovasi pemberdayaan berbasis masyarakat.
d. Masih terbatasnya kolaborasi dengan sektor swasta dan dunia usaha.

6. Tantangan Layanan di Wilayah Perbatasan, Kepulauan, dan Pedesaan
   a. Jarak dan aksesibilitas yang sulit menghambat pelayanan sosial, terutama di Pulau Sebatik dan wilayah pedalaman.
   b. Ketimpangan akses terhadap layanan sosial dasar antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
   c. Terbatasnya tenaga kerja sosial profesional di wilayah terpencil.
   d. Kurangnya sarana prasarana layanan sosial di daerah perbatasan.

2.1.6. Peluang Pengembangan Pelayanan DSP3A *(pindah)*

Kabupaten Nunukan sebagai daerah perbatasan dengan Malaysia memiliki peluang besar dalam pengembangan layanan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak. Letak geografis yang strategis menjadikan Kabupaten Nunukan sebagai pintu gerbang interaksi sosial, budaya, dan ekonomi, sehingga memerlukan penguatan layanan sosial untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia.

Salah satu indikator peluang besar dalam pengembangan pelayanan sosial adalah adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nunukan sebesar 4,90 persen pada triwulan IV tahun 2024 (BPS Kabupaten Nunukan). Pertumbuhan ekonomi yang stabil ini berdampak pada meningkatnya daya dukung pemerintah daerah dalam menyediakan layanan sosial yang lebih inklusif dan merata.

Sejalan dengan Asta Cita Prabowo Gibran butir keenam yaitu Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, terdapat komitmen pemerintah

pusat dalam memperkuat pelayanan sosial di daerah perbatasan melalui program dan kegiatan, termasuk dukungan pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang sosial.

Peluang pengembangan layanan sosial di Kabupaten Nunukan sangat besar, terutama dalam memperkuat perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan akses layanan di wilayah pedesaan dan perbatasan. Peluang ini dapat mendorong peningkatan kualitas hidup, memperkuat ketahanan keluarga, serta menekan angka kemiskinan dan kerentanan sosial. Untuk menjawab tantangan yang ada, DSP3A Kabupaten Nunukan dapat memanfaatkan peluang sebagai berikut:

a) Pemanfaatan program bantuan sosial nasional (PKH, BPNT, BLT) sebagai instrumen pengentasan kemiskinan berbasis data terpadu yang lebih akurat.
b) Peningkatan program pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kewirausahaan, akses permodalan, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa dan perbatasan.
c) Penguatan layanan perlindungan anak, termasuk penyediaan rumah aman, unit layanan terpadu, dan sistem pelaporan kekerasan berbasis teknologi.
d) Kolaborasi dengan lembaga swasta, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam pengembangan CSR sosial untuk meningkatkan akses layanan masyarakat.
e) Pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan layanan sosial, termasuk digitalisasi data penerima manfaat dan sistem pengaduan masyarakat.
f) Dukungan regulasi, salah satunya melalui implementasi Perda Kabupaten Nunukan tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, yang menjadi landasan hukum dalam melaksanakan program perlindungan sosial.
g) Sinergi dengan misi Bupati Nunukan periode 2025–2029 khususnya Misi ke-2: “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Sejahtera”, yang relevan dengan visi pelayanan DSP3A.

Dengan memanfaatkan peluang tersebut, pelayanan sosial di Kabupaten Nunukan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Berikut manfaat spesifik dari pengembangan pelayanan DSP3A:

1. Program perlindungan sosial yang tepat sasaran dapat menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Pemberdayaan perempuan melalui pendidikan, pelatihan, dan kewirausahaan dapat meningkatkan peran perempuan dalam ekonomi keluarga dan pembangunan daerah.
3. Perlindungan anak yang kuat akan menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.
4. Layanan sosial yang inklusif bagi penyandang disabilitas dan lansia dapat mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan akses.
5. Kolaborasi lintas sektor dan dukungan regulasi yang kuat akan mempercepat pencapaian kesejahteraan sosial yang merata, terutama di wilayah perbatasan dan pedesaan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Kondisi spesifik Kabupaten Nunukan yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang sosial dan perlindungan anak adalah wilayah administratif yang cukup luas mencapai 14.369 km2 yang terdiri dari 21 wilayah kecamatan dan 240 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 199.897 Jiwa (sumber data BPS, 2021).

Dengan kondisi tersebut sebagian besar wilayah Kabupaten Nunukan berada pada wilayah daratan Kalimantan dan berbatasan langsung dengan Negara Malaysia, disamping itu wilayah ini ada sebagian masih masuk dalam kategori 3 T (terluar, terdepan dan terpenci). hal tersebut menimbulkan permasalahan tersendiri pada

Bidang Sosial dan Perlindungan Anak yang berkembang dewasa ini.

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan pada wilayah 3 T, khsusnya pada bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan. ketelantaran, difabilitas, ketunaansosial, penyimpangan perilaku ketertinggalan/ keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan memasuki Tahun 2025-2029, berikut beberapa kondisi internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan, sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan diantaranya sebagai berikut :

1. Permasalahan terkait kesekretariatan;
    a. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi public
    b. Kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.
    c. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Perangkat Daerah.
2. Permasalahan terkait Sosial;
    a. Masih rendahnya cakupan penanganan keluarga miskin yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
    b. Masih adanya keluarga miskin yang belum masuk dalam Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan.
    c. Basis Data Terpadu Program Penanggulangan bersifat dinamis /berubah.

d. Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan keluarga miskin dalam mengembangkan bantuan sosial dan usaha ekonomi produktif.
e. Belum optimalnya keberfungsian PSKS
f. Belum optimalnya penanganan terhadap korban bencana karena peralatan dan perlengkapan tanggap darurat bencana belum memadai.

3. Permasalahan terkait PPPA;
   a. Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen.
   b. Belum semua PD melaksanakan PPRG.
   c. Belum optimalnya kelembagan PUG.
   d. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT.
   e. Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan.
   f. Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH)
   g. Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual, dan penipuan, terlihat dari kasus pornografi
   h. Masih belum meratanya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   i. Perhatian dan partisipasi dari kalangan dunia usaha/dunia industri (DUDI) tentang PPPA masih belum optimal.

2.1.5. Tantangan Pengembangan Pelayanan DSP3A

2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan perangkat daerah dikaitkan dengan sasaran jangka menengah baik dari Kementerian Sosial maupun Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara yaitu masih terbatasnya

cakupan penanganan PMKS. Metode penentuan isu strategis dilakukan dengan melakukan sintesa kewenangan baik dari Undang-undang No 23 Tahun 2014, Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta Undang-undang di bidang Sosial. Isu-isu strategis adalah permasalahan permasalahan pokok yang akan diprioritaskan penyelesaiannya dalam Renstra 5 (lima) tahun kedepan. Isu-isu strategis di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan dirumuskan dengan metode FGD (Focuss Group Discussion) yang menghasilkan sebagai berikut:

1. Masih rendahnya penanganan PMKS dibandingkan dengan jumlah PMKS yang ada.
2. Belum optimalnya peran aktif PSKS dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.
3. Masih rendahnya keluarga miskin dan rentan yang mendapatkan intervensi program penanggulangan kemiskinan.
4. Belum Optimalnya kualitas hidup perempuan ditandai dengan rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif
5. Lemahnya system data informasi gender dan anak dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan gender
6. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, penelantaran, eksploitasi terhadap anak, namun belum disertai sistem perlindungan dan pelayanan terpadu yang memadai.
7. Belum optimalnya pemenuhan hak anak, terlihat dari belum tercetusnya Kabupaten Layak Anak.

Berdasarkan issu strategis tersebut maka dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal, sehingga dapat dirumuskan strategi dengan menggunakan metoda analisis SWOT yang dikelompokan ke dalam 4 strategi, yaitu:

1. Analisa Lingkungan Internal

Permintaan Perencanaan Strategis harus dimulai dari analisa lingkungan strategis. Analisa terhadap lingkungan Strategis sangat penting dilakukan mengingat Efisiensi dan Efektifitas Program sangat tergantung dari kemampuan untuk mengikuti dan menjawab dinamika tuntutan perubahan dan perkembangan issu sentral lingkungan Strategis yang demikian cepat.

Dalam Renstra ini menggunakan dua pencermatan terhadap lingkungan Internal Dinas Sosial, PPPA.

a. Kekuatan (*Strength*)
   - Adanya dukungan dan komitmen dari Pimpinan instansi
   - Dukungan Staf / SDM
   - Struktur Organisasi dan Tupoksi
   - Tersedianya data tentang PMKS yang valid dan akurat
   - Dukungan dari organisasi sosial

b. Kelemahan (*Weakness*)
   - Sumber daya aparatur masih rendah
   - Koordinasi antar instansi terkait/antar SKPD masih kurang
   - Terbatasnya anggaran dalam penyelengaraan kegiatan
   - Meningkatnya penyandang masalah sosial.

2. Analisa Lingkungan Eksternal

   Adanya perubahan Konteks kehidupan berbangsa yang ditandai dengan dikeluarkannya beberapa ketentuan baku menjadi bukti adanya Political Will para Stakeholder. Untuk merespon dinamika tuntutan lingkungan Strategis. Perubahan Lingkungan Strategis menuntut adanya Pergeseran pendekatan yang berlangsung selama ini.

   a. Peluang (*Oppurtunity*)
      - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
- Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang tentang Ketenagakerjaan Pertumbuhan ekonomi sudah mulai baik.

b. Ancaman (*Threats*)

- Rendahnya keterampilan/skill PMKS.
- Meningkatnya angka penyandang masalah sosial
- Kemungkinan terjadinya perubahan kebijakan, baik secara Regional maupun Nasional.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah

Tujuan kepala daerah terpilih sebagaimana tertuang pada RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025 – 2029 yang terkait dengan urusan berdasarkan layanan fungsi utama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah **"Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing"** Terkait dengan tujuan dan sasaran tersebut, untuk mendukung pencapaiannya Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Nunukan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatnya Kualitas Penanganan dan Pelayanan PPKS
2. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Sasaran:

1. Meningkatnya nilai SAKIP perangkat daerah
2. Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS
3. Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial PPKS
4. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial PPKS
5. Meningkatnya Kualitas Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
6. Meningkatnya Peran Perempuan Terhadap Pendapatan

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Nunukan berikut target kinerja sasaran pada periode Tahun 2025 – 2029 secara lengkap tersaji pada tabel berikut:

TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD PEMERINTAH
KABUPATEN NUNUKAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak											
- Meningkatnya Keberdayaan dan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan	Menguatnya Pelindungan dan Pemberdayaan Sosial Kelompok Rentan		Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	54,94	54,94	54,94	54,94	54,94	54,94	54,94	
			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)	73,85	73,86	73,87	73,88	73,89	73,90	73,91	
		Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)	40	43	46	49	52	55	58	
			Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan Rehabilitasi Sosial (%)	94	95	96	97	98	99	99,1	
			Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)	75	76	77	78	79	80	81	
		meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)	84,14	84,49	84,50	84,52	84,53	84,53	84,55	
			Persentase Pelayanan dan Pendampingan Kekerasan Terhadap PerempuanÂ danÂ Anak (%)	0	50	51	52	53	54	55	
		Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Perangkat Daerah	Predikat Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	B	B	BB	BB	A	

(Tabel 2.7 Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan DSP3A)

3.2. Straregi Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan, arah kebijakan adalah rumusan kerangka piker atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan

mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan sebagai penjabaran strategi.

Dalam rangka mencapai tujuan, Dinas Sosial, Pemberdyaan Perempuan dan Perlindungan anak merumuskan kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai bentuk upaya penyelarasan antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DSP3A) Kabupaten Nunukan harus mempertimbangkan kapasitas riil keuangan daerah sebelum menetapkan alokasi anggaran belanja tahunan sepanjang periode Renstra 2025–2029. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada kemampuan keuangan yang realistis dan akuntabel.

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan Renstra PD (Rencana Strategis) merupakan pendekatan terstruktur yang digunakan untuk menyusun rencana strategis perangkat daerah dalam jangka waktu lima tahun. Kerangka ini berfungsi sebagai panduan untuk mengidentifikasi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Dengan adanya kerangka perumusan program Renstra, DSP3A dapat memiliki arah yang jelas dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta meningkatkan peluang keberhasilan dalam mencapai tujuan jangka panjangnya, khususnya di bidang sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Kerangka perumusan program Renstra DSP3A memiliki hubungan erat dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Renstra DSP3A merupakan penjabaran lebih rinci dari RPJMD pada tingkat perangkat daerah yang mengarahkan kegiatan pembangunan sosial selama lima tahun. Renstra berfungsi sebagai pedoman bagi DSP3A dalam melaksanakan program-program pembangunan sosial yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, RPJMD memberikan arah kebijakan umum, sementara Renstra DSP3A merincikan pelaksanaan program pembangunan sosial pada tingkat perangkat daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkeadilan.

4.1. Uraian Program DSP3A Kabupaten Nunukan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasional harus dituangkan dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan. Program yang disusun harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, sehingga dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan bidang urusan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyusunan program, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan lebih efektif, efisien, akuntabel, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi organisasi. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai hasil yang ditargetkan, yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun melalui kerja sama dengan masyarakat, lembaga sosial, ataupun mitra pembangunan lainnya.

Program-program dalam Renstra merupakan instrumen untuk menerjemahkan tujuan strategis organisasi ke dalam tindakan nyata. Program tersebut dirancang untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, sehingga berkontribusi pada pencapaian tujuan DSP3A. Setiap program harus didasarkan pada analisis kebutuhan yang komprehensif agar relevan dengan kondisi sosial masyarakat, serta mampu menjawab persoalan kemiskinan, ketidaksetaraan gender, perlindungan anak, dan isu-isu sosial lainnya. Program juga harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik berupa anggaran, tenaga kerja, maupun sarana prasarana. Dengan demikian, program dalam Renstra DSP3A berperan penting dalam mencapai sasaran

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.674.293.938,38		2.715.097.469,99		2.741.248.292,87		2.765.563.669,81		2.800.930.410,28	
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					638.927.864,41		648.676.423,81		654.924.237,18		660.733.535,71		669.183.166,34	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Masyarakat Adat Terpencil yang Meningkat Pendapatannya (%)	0	0	10	638.927.864,41	15	648.676.423,81	20	654.924.237,18	25	660.733.535,71	30	669.183.166,34	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
	Persentase Sumber daya Kesejahteraan yang Diberdayakan (%)	0	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					76.281.748,96		77.445.631,77		78.191.559,69		78.885.133,22		79.893.936,62	
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	0	100	76.281.748,96	100	77.445.631,77	50	78.191.559,69	100	78.885.133,22	100	79.893.936,62	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					719.515.146,22		730.493.280,90		737.529.124,22		744.071.143,31		753.586.516,72	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi PPKS (%)	70,2	0	90	719.515.146,22	95	730.493.280,90	95	737.529.124,22	95	744.071.143,31	100	753.586.516,72	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					887.924.156,54		901.471.822,66		910.154.468,57		918.227.706,24		929.970.238,64	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarkat Rentan	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Ditangani (%)	39,5	0	100	887.924.156,54	100	901.471.822,66	100	910.154.468,57	100	918.227.706,24	100	929.970.238,64	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					283.642.606,69		287.970.335,93		290.743.960,57		293.322.913,02		297.074.001,97	
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Meningkatya Perlindungan Sosial Korban Bencana (%)	17,8	0	100	283.642.606,69	100	287.970.335,93	100	290.743.960,57	100	293.322.913,02	100	297.074.001,97	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					68.002.415,56		69.039.974,92		69.704.942,64		70.323.238,31		71.222.549,99	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Cakupan TMP yang terpelihara (%)	100	0	100	68.002.415,56	100	69.039.974,92	100	69.704.942,64	100	70.323.238,31	100	71.222.549,99	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					7.286.409.593,40		7.397.583.327,83		7.468.834.136,86		7.535.084.070,44		7.631.444.666,16	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.741.665.482,08		6.844.527.683,05		6.910.451.662,96		6.971.748.641,22		7.060.905.158,39	
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	100	6.741.665.482,08	100	6.844.527.683,05	100	6.910.451.662,96	100	6.971.748.641,22	100	7.060.905.158,39	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					138.998.685,01		141.119.483,01		142.478.694,11		143.742.506,35		145.580.722,54	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2,41	0	2,43	138.998.685,01	2,44	141.119.483,01	2,45	142.478.694,11	2,46	143.742.506,35	2,46	145.580.722,54	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					71.162.362,20		72.248.135,03		72.944.002,57		73.591.029,29		74.532.130,33	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO per 10.000 Penduduk Perempuan (Rasio)	0	0	100	71.162.362,20	100	72.248.135,03	100	72.944.002,57	100	73.591.029,29	100	74.532.130,33	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					79.367.956,95		80.578.928,15		81.355.034,83		82.076.668,97		83.126.286,55	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Tingkat Partisipasi Aggkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	75,53	0	75,56	79.367.956,95	75,57	80.578.928,15	75,58	81.355.034,83	75,59	82.076.668,97	75,59	83.126.286,55	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					101.966.939,32		103.522.718,65		104.519.811,51		105.446.921,47		106.795.403,86	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan data Gender dan Anak Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan (%)	20	0	22	101.966.939,32	26	103.522.718,65	30	104.519.811,51	34	105.446.921,47	38	106.795.403,86	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					90.248.016,20		91.624.991,90		92.507.490,21		93.328.048,68		94.521.551,80	
Terjaminnya Hak Anak	Persentase Kecamatan Layak Anak (%)	100	0	100	90.248.016,20	100	91.624.991,90	100	92.507.490,21	100	93.328.048,68	100	94.521.551,80	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					63.000.151,64		63.961.388,04		64.577.440,67		65.150.254,46		65.983.412,69	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Anak termasuk (per 10.000 anak) (Rasio)	3	0	8	63.000.151,64	8	63.961.388,04	8	64.577.440,67	8	65.150.254,46	8	65.983.412,69	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
TOTAL KESELURUHAN					9960703531.78		10112680797.82		10210082429.73		10300647740.25		10432375076.44	

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
- Meningkatnya Keberdayaan dan Partisipasi Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Pembangunan	Menguatnya Pelindungan dan Pemberdayaan Sosial Kelompok Rentan				Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		
					Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (Indeks)		
		Meningkatnya Penanganan dan Pemberdayaan Sosial PPKS			Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial (%)		
					Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan Rehabilitasi Sosial (%)		
					Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial (%)		
			Meningkatnya pemberdayaan sosial		Persentase Masyarakat Adat Terpencil yang Meningkat Pendapatannya (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
					Persentase Sumber daya Kesejahteraan yang Diberdayakan (%)	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Jumlah KAT yang diberdayakan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	
					Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	
				Jumlah rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan		Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
					Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial		Persentase Pelayanan Rehabilitasi PPKS (%)	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan	
					Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan	
					Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	
					Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan	
			Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarkat Rentan		Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Ditangani (%)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Jumlah anak terlantar yang ditangani	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar	
					Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
				Jumlah data fakir miskin yang valid	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
					Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
					Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana		Meningkatya Perlindungan Sosial Korban Bencana (%)	1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang	
					Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	
					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial	
					Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	
				Jumlah Kampung Siaga Bencana yang di selenggarakan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani		1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
						1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kampung Siaga Bencana yang di selenggarakan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	
					Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
					Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	
		meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan			Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%)		
					Persentase Pelayanan dan Pendampingan Kekerasan Terhadap PerempuanÂ danÂ Anak (%)		
			Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD		Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerj yang disusun	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Jumlah bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				jumlah unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				jumlah barang milik daerah yang dibutuhkan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
				Jumlah unit kerja internal yg memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				jumlah barang milik daerah yang dibutuhkan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.08.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
				Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat penguatan dan pengembangan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan		Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO per 10.000 Penduduk Perempuan (Rasio)	2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
				Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan		2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
						2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak		Tingkat Partisipasi Aggkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
				Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan dalam rangka meningktakan kualitas keluarganya		2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
			Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak		Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan data Gender dan Anak Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan (%)	2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	
				Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	
			Terjaminnya Hak Anak		Persentase Kecamatan Layak Anak (%)	2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
				Jumlah Lembaga PHA	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Jumlah Lembaga Penyedia Layanan		2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
						2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan		Rasio Kekerasan Terhadap Anak termasuk (per 10.000 anak) (Rasio)	2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	
				Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan		2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
						2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				jumlah anak yang menerima layanan perlindungan khusus daerah kab/kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
RANCANGAN AKHIR
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak										
I	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	83,97	85,20	85,76	86,32	86,88	87,44	88,00	
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	98,33	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	100	
3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,362	0,359	0,348	0,337	0,326	0,315	0,304	
4	Persentase penanganan tanggap bencana darurat	%	15	30	30	50	50	50	50	
5	Persentase ARG Daerah	%	2,41	2,42	2,43	2,44	2,45	2,46	2,46	
6	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	98,46	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
7	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persentase	25	30	30	30	35	40	50	
8	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	93,18	94	95	96	97	98	100	
9	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	17,80	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	%	100	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				2.674.293.938,38		2.715.097.469,99		2.741.248.292,87		2.765.563.669,81		2.800.930.410,28		
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				638.927.864,41		648.676.423,81		654.924.237,18		660.733.535,71		669.183.166,34		
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Masyarakat Adat Terpencil yang Meningkat Pendapatannya (%)	0	10	638.927.864,41	15	648.676.423,81	20	654.924.237,18	25	660.733.535,71	30	669.183.166,34	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Persentase Sumber daya Kesejahteraan yang Diberdayakan (%)	0	100		100		100		100		100			
1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)				270.000.000,00		273.000.000,00		273.000.000,00		265.700.000,00		270.000.000,00		
Jumlah KAT yang diberdayakan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	10	10	270.000.000,00	11	273.000.000,00	12	273.000.000,00	13	265.700.000,00	14	270.000.000,00		
1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT				270.000.000,00		273.000.000,00		273.000.000,00		265.700.000,00		270.000.000,00		
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	10	10	270.000.000,00	11	273.000.000,00	12	273.000.000,00	13	265.700.000,00	14	270.000.000,00		
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				78.927.864,41		75.676.423,81		72.924.237,18		79.033.535,71		75.183.166,34		
Jumlah rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1	1	78.927.864,41	1	75.676.423,81	1	72.924.237,18	1	79.033.535,71	1	75.183.166,34		
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				78.927.864,41		75.676.423,81		72.924.237,18		79.033.535,71		75.183.166,34		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1	1	78.927.864,41	1	75.676.423,81	1	72.924.237,18	1	79.033.535,71	1	75.183.166,34		
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				290.000.000,00		300.000.000,00		309.000.000,00		316.000.000,00		324.000.000,00		
Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0	3	290.000.000,00	3	300.000.000,00	4	309.000.000,00	4	316.000.000,00	5	324.000.000,00		
	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	10	3		3		4		4		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	0	1		1		1		1		1			
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		51.000.000,00		52.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	10	3	50.000.000,00	3	51.000.000,00	4	52.000.000,00	4	46.000.000,00	5	46.000.000,00		
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		51.000.000,00		52.000.000,00		53.000.000,00		54.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5	5	50.000.000,00	5	51.000.000,00	5	52.000.000,00	5	53.000.000,00	5	54.000.000,00		
1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota				90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		
Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	0	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00		
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		103.000.000,00		105.000.000,00		107.000.000,00		109.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0	3	100.000.000,00	3	103.000.000,00	4	105.000.000,00	4	107.000.000,00	5	109.000.000,00		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN				76.281.748,96		77.445.631,77		78.191.559,69		78.885.133,22		79.893.936,62		
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	100	76.281.748,96	100	77.445.631,77	50	78.191.559,69	100	78.885.133,22	100	79.893.936,62	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				76.281.748,96		77.445.631,77		78.191.559,69		78.885.133,22		79.893.936,62		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6	3	76.281.748,96	3	77.445.631,77	4	78.191.559,69	4	78.885.133,22	5	79.893.936,62		
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				76.281.748,96		77.445.631,77		78.191.559,69		78.885.133,22		79.893.936,62		
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6	3	76.281.748,96	3	77.445.631,77	4	78.191.559,69	4	78.885.133,22	5	79.893.936,62		
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				719.515.146,22		730.493.280,90		737.529.124,22		744.071.143,31		753.586.516,72		
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi PPKS (%)	70,2	90	719.515.146,22	95	730.493.280,90	95	737.529.124,22	95	744.071.143,31	100	753.586.516,72	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				619.514.146,22		620.492.280,90		616.528.124,22		623.970.143,31		633.585.516,72		
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	78	12	619.514.146,22	12	620.492.280,90	13	616.528.124,22	13	623.970.143,31	13	633.585.516,72		
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	37	20		21		22		23		24			
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		20		25		30		35		40			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	60		65		70		75		80			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	382	60		60		62		62		64			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	460	55		55		55		55		55			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	31	19		20		21		22		23			
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	7		7		8		8		9			
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan				110.297.070,00		110.297.070,00		111.563.924,00		72.909.000,00		27.418.800,00		
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	60	110.297.070,00	65	110.297.070,00	70	111.563.924,00	75	72.909.000,00	80	27.418.800,00		
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				95.197.076,22		54.773.210,90		10.000.000,22		15.100.523,31		25.410.034,72		
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)		20	95.197.076,22	25	54.773.210,90	30	10.000.000,22	35	15.100.523,31	40	25.410.034,72		
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu				100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		130.100.000,00		146.410.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	31	19	100.000.000,00	20	110.000.000,00	21	115.000.000,00	22	130.100.000,00	23	146.410.000,00		
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar				64.000.000,00		70.400.000,00		77.440.000,00		85.184.000,00		93.702.400,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	78	12	64.000.000,00	12	70.400.000,00	13	77.440.000,00	13	85.184.000,00	13	93.702.400,00		
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				50.010.000,00		55.011.000,00		60.512.100,00		66.563.310,00		73.219.641,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	460	55	50.010.000,00	55	55.011.000,00	55	60.512.100,00	55	66.563.310,00	55	73.219.641,00		
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan				50.010.000,00		55.011.000,00		60.512.100,00		66.563.310,00		73.219.641,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	382	60	50.010.000,00	60	55.011.000,00	62	60.512.100,00	62	66.563.310,00	64	73.219.641,00		
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan				50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	7	50.000.000,00	7	55.000.000,00	8	60.500.000,00	8	66.550.000,00	9	73.205.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		121.000.000,00		121.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	37	20	100.000.000,00	21	110.000.000,00	22	121.000.000,00	23	121.000.000,00	24	121.000.000,00		
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				100.001.000,00		110.001.000,00		121.001.000,00		120.101.000,00		120.001.000,00		
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	100.001.000,00	5	110.001.000,00	6	121.001.000,00	6	120.101.000,00	6	120.001.000,00		
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3	16		16		17		17		17			
1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		120.100.000,00		120.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	5	100.000.000,00	5	110.000.000,00	6	121.000.000,00	6	120.100.000,00	6	120.000.000,00		
1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan				1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3	16	1.000,00	16	1.000,00	17	1.000,00	17	1.000,00	17	1.000,00		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				887.924.156,54		901.471.822,66		910.154.468,57		918.227.706,24		929.970.238,64		
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarkat Rentan	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Ditangani (%)	39,5	100	887.924.156,54	100	901.471.822,66	100	910.154.468,57	100	918.227.706,24	100	929.970.238,64	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				237.344.000,00		264.939.400,00		291.433.340,00		320.576.674,00		352.634.341,00		
Jumlah anak terlantar yang ditangani	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2	6	237.344.000,00	6	264.939.400,00	6	291.433.340,00	6	320.576.674,00	6	352.634.341,00		
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	4		4		4		4		4			
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar				89.200.000,00		101.981.000,00		112.179.100,00		123.397.010,00		135.736.711,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2	6	89.200.000,00	6	101.981.000,00	6	112.179.100,00	6	123.397.010,00	6	135.736.711,00		
1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar				48.152.000,00		52.967.200,00		58.263.920,00		64.090.312,00		70.499.343,00		
Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	2	48.152.000,00	2	52.967.200,00	2	58.263.920,00	2	64.090.312,00	2	70.499.343,00		
1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar				99.992.000,00		109.991.200,00		120.990.320,00		133.089.352,00		146.398.287,00		
Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	4	99.992.000,00	4	109.991.200,00	4	120.990.320,00	4	133.089.352,00	4	146.398.287,00		
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				650.580.156,54		636.532.422,66		618.721.128,57		597.651.032,24		577.335.897,64		
Jumlah data fakir miskin yang valid	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	4.998	4.512	650.580.156,54	4.512	636.532.422,66	4.512	618.721.128,57	4.512	597.651.032,24	4.512	577.335.897,64		
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	4.998	4.512		4.512		4.512		4.512		4.512			
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5.050	5.050		5.050		5.050		5.050		5.050			
	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4	6		6		6		6		6			
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				375.228.606,54		338.645.717,66		296.045.752,57		247.708.119,24		197.398.692,64		
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	4.998	4.512	375.228.606,54	4.512	338.645.717,66	4.512	296.045.752,57	4.512	247.708.119,24	4.512	197.398.692,64		
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				100.680.000,00		105.748.000,00		111.322.800,00		117.455.080,00		124.200.588,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4	6	100.680.000,00	6	105.748.000,00	6	111.322.800,00	6	117.455.080,00	6	124.200.588,00		
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				78.665.000,00		86.531.500,00		95.184.650,00		104.703.115,00		115.173.427,00		
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5.050	5.050	78.665.000,00	5.050	86.531.500,00	5.050	95.184.650,00	5.050	104.703.115,00	5.050	115.173.427,00		
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				96.006.550,00		105.607.205,00		116.167.926,00		127.784.718,00		140.563.190,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	4.998	4.512	96.006.550,00	4.512	105.607.205,00	4.512	116.167.926,00	4.512	127.784.718,00	4.512	140.563.190,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA				283.642.606,69		287.970.335,93		290.743.960,57		293.322.913,02		297.074.001,97		
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Meningkatya Perlindungan Sosial Korban Bencana (%)	17,8	100	283.642.606,69	100	287.970.335,93	100	290.743.960,57	100	293.322.913,02	100	297.074.001,97	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				121.000.000,00		110.000.000,00		95.000.000,00		79.000.000,00		61.000.000,00		
Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	4	121.000.000,00	4	110.000.000,00	4	95.000.000,00	4	79.000.000,00	4	61.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	48	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38	65		65		65		65		65			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	109	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500			
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	141	140		140		140		140		140			
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan				80.000.000,00		90.000.000,00		60.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	48	1.500	80.000.000,00	1.500	90.000.000,00	1.500	60.000.000,00	1.500	20.000.000,00	1.500	25.000.000,00		
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang				15.000.000,00		5.000.000,00		20.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	109	1.500	15.000.000,00	1.500	5.000.000,00	1.500	20.000.000,00	1.500	5.000.000,00	1.500	10.000.000,00		
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				15.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38	65	15.000.000,00	65	5.000.000,00	65	5.000.000,00	65	15.000.000,00	65	10.000.000,00		
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00		
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	141	140	5.000.000,00	140	5.000.000,00	140	5.000.000,00	140	20.000.000,00	140	10.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				6.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		19.000.000,00		6.000.000,00		
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	4	6.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	19.000.000,00	4	6.000.000,00		
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				162.642.606,69		177.970.335,93		195.743.960,57		214.322.913,02		236.074.001,97		
Jumlah Kampung Siaga Bencana yang di selenggarakan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	0	2	162.642.606,69	2	177.970.335,93	2	195.743.960,57	2	214.322.913,02	2	236.074.001,97		
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	6		6		6		6		6			
	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0	20		20		20		20		20			
Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani				0		0		0		0		0		
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana				99.998.591,00		109.998.450,00		120.998.295,00		133.098.125,00		146.407.937,00		
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	0	2	99.998.591,00	2	109.998.450,00	2	120.998.295,00	2	133.098.125,00	2	146.407.937,00		
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana				59.990.115,69		65.989.185,93		72.588.065,57		79.846.888,02		87.831.564,97		
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	6	59.990.115,69	6	65.989.185,93	6	72.588.065,57	6	79.846.888,02	6	87.831.564,97		
1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda				2.653.900,00		1.982.700,00		2.157.600,00		1.377.900,00		1.834.500,00		
Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0	20	2.653.900,00	20	1.982.700,00	20	2.157.600,00	20	1.377.900,00	20	1.834.500,00		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN				68.002.415,56		69.039.974,92		69.704.942,64		70.323.238,31		71.222.549,99		
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Cakupan TMP yang terpelihara (%)	100	100	68.002.415,56	100	69.039.974,92	100	69.704.942,64	100	70.323.238,31	100	71.222.549,99	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				68.002.415,56		69.039.974,92		69.704.942,64		70.323.238,31		71.222.549,99		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah Kawasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	68.002.415,56	1	69.039.974,92	1	69.704.942,64	1	70.323.238,31	1	71.222.549,99		
	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	1		1		1		1		1			
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				12.079.000,00		15.086.900,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	12.079.000,00	1	15.086.900,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				29.984.845,00		32.983.330,00		36.281.662,00		39.909.829,00		43.900.812,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	1	29.984.845,00	1	32.983.330,00	1	36.281.662,00	1	39.909.829,00	1	43.900.812,00		
1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				25.938.570,56		20.969.744,92		18.423.280,64		15.413.409,31		12.321.737,99		
Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	0	12	25.938.570,56	12	20.969.744,92	12	18.423.280,64	12	15.413.409,31	12	12.321.737,99		
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				7.286.409.593,40		7.397.583.327,83		7.468.834.136,86		7.535.084.070,44		7.631.444.666,16		
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.741.665.482,08		6.844.527.683,05		6.910.451.662,96		6.971.748.641,22		7.060.905.158,39		
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	6.741.665.482,08	100	6.844.527.683,05	100	6.910.451.662,96	100	6.971.748.641,22	100	7.060.905.158,39	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				60.000.000,00		54.527.000,00		100.451.662,00		82.900.000,00		78.905.158,00		
Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerj yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	60.000.000,00	1	54.527.000,00	1	100.451.662,00	1	82.900.000,00	1	78.905.158,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				40.000.000,00		40.000.000,00		65.451.662,00		49.900.000,00		40.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	65.451.662,00	5	49.900.000,00	5	40.000.000,00		
2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20.000.000,00		14.527.000,00		35.000.000,00		33.000.000,00		38.905.158,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	20.000.000,00	1	14.527.000,00	1	35.000.000,00	1	33.000.000,00	1	38.905.158,00		
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.534.408.220,00		5.600.000.000,00		5.650.000.000,00		5.700.000.000,00		5.750.000.000,00		
Jumlah bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	5.534.408.220,00	12	5.600.000.000,00	12	5.650.000.000,00	12	5.700.000.000,00	12	5.750.000.000,00		
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				5.534.408.220,00		5.600.000.000,00		5.650.000.000,00		5.700.000.000,00		5.750.000.000,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	5.534.408.220,00	12	5.600.000.000,00	12	5.650.000.000,00	12	5.700.000.000,00	12	5.750.000.000,00		
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				152.127.057,08		171.000.683,05		183.000.000,96		181.848.641,22		199.000.000,39		
jumlah unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	152.127.057,08	1	171.000.683,05	1	183.000.000,96	1	181.848.641,22	1	199.000.000,39		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				99.988.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	99.988.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00		
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				20.893.180,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.893.180,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00	1	24.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				8.334.877,08		9.000.683,05		10.000.000,96		1.100.000,22		12.000.000,39		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	8.334.877,08	1	9.000.683,05	1	10.000.000,96	1	1.100.000,22	1	12.000.000,39		
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				22.911.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		36.748.641,00		37.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	22.911.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	36.748.641,00	1	37.000.000,00		
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
jumlah barang milik daerah yang dibutuhkan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	50.000.000,00	5	55.000.000,00	5	60.000.000,00	5	65.000.000,00	5	70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	5	50.000.000,00	5	55.000.000,00	5	60.000.000,00	5	65.000.000,00	5	70.000.000,00		
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				905.130.205,00		944.000.000,00		877.000.000,00		902.000.000,00		923.000.000,00		
Jumlah unit kerja internal yg memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	905.130.205,00	1	944.000.000,00	1	877.000.000,00	1	902.000.000,00	1	923.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				8.172.525,00		9.000.000,00		17.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	8.172.525,00	1	9.000.000,00	1	17.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00		
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				95.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00		
2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				7.200.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	7.200.000,00	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00		
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				794.757.680,00		800.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	794.757.680,00	1	800.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00		
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				40.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
jumlah barang milik daerah yang dibutuhkan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	4	40.000.000,00	4	20.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				20.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	4	20.000.000,00	4	10.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				20.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN				138.998.685,01		141.119.483,01		142.478.694,11		143.742.506,35		145.580.722,54		
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2,41	2,43	138.998.685,01	2,44	141.119.483,01	2,45	142.478.694,11	2,46	143.742.506,35	2,46	145.580.722,54	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				113.998.685,01		116.119.483,01		117.478.694,11		118.742.506,35		120.580.722,54		
Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	113.998.685,01	1	116.119.483,01	1	117.478.694,11	1	118.742.506,35	1	120.580.722,54		
	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	50		50		50		50		50			
2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG				63.998.685,01		66.119.483,01		67.478.694,11		68.742.506,35		80.580.722,54		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	63.998.685,01	1	66.119.483,01	1	67.478.694,11	1	68.742.506,35	1	80.580.722,54		
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	40.000.000,00		
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat penguatan dan pengembangan	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	25	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00	30	25.000.000,00		
	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	6		6		6		6		6			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00		
2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	25	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00		
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN				71.162.362,20		72.248.135,03		72.944.002,57		73.591.029,29		74.532.130,33		
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO per 10.000 Penduduk Perempuan (Rasio)	0	100	71.162.362,20	100	72.248.135,03	100	72.944.002,57	100	73.591.029,29	100	74.532.130,33	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan				0		0		0		0		0		
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				47.998.000,20		52.797.800,03		58.077.580,57		63.885.338,29		54.532.130,33		
Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	6	4	47.998.000,20	5	52.797.800,03	6	58.077.580,57	7	63.885.338,29	8	54.532.130,33		
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				47.998.000,20		52.797.800,03		58.077.580,57		63.885.338,29		54.532.130,33		
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	6	4	47.998.000,20	5	52.797.800,03	6	58.077.580,57	7	63.885.338,29	8	54.532.130,33		
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				23.164.362,00		19.450.335,00		14.866.422,00		9.705.691,00		20.000.000,00		
Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	0	25	23.164.362,00	30	19.450.335,00	35	14.866.422,00	40	9.705.691,00	45	20.000.000,00		
2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				23.164.362,00		19.450.335,00		14.866.422,00		9.705.691,00		20.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	0	25	23.164.362,00	30	19.450.335,00	35	14.866.422,00	40	9.705.691,00	45	20.000.000,00		
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA				79.367.956,95		80.578.928,15		81.355.034,83		82.076.668,97		83.126.286,55		
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Tingkat Partisipasi Aggkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	75,53	75,56	79.367.956,95	75,57	80.578.928,15	75,58	81.355.034,83	75,59	82.076.668,97	75,59	83.126.286,55	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan dalam rangka meningktakan kualitas keluarganya				0		0		0		0		0		
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				79.367.956,95		80.578.928,15		81.355.034,83		82.076.668,97		83.126.286,55		
Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	5	79.367.956,95	5	80.578.928,15	5	81.355.034,83	5	82.076.668,97	5	83.126.286,55		
2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				79.367.956,95		80.578.928,15		81.355.034,83		82.076.668,97		83.126.286,55		
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	5	79.367.956,95	5	80.578.928,15	5	81.355.034,83	5	82.076.668,97	5	83.126.286,55		
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK				101.966.939,32		103.522.718,65		104.519.811,51		105.446.921,47		106.795.403,86		
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan data Gender dan Anak Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan (%)	20	22	101.966.939,32	26	103.522.718,65	30	104.519.811,51	34	105.446.921,47	38	106.795.403,86	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				101.966.939,32		103.522.718,65		104.519.811,51		105.446.921,47		106.795.403,86		
Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	101.966.939,32	1	103.522.718,65	1	104.519.811,51	1	105.446.921,47	1	106.795.403,86		
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota				101.966.939,32		103.522.718,65		104.519.811,51		105.446.921,47		106.795.403,86		
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	101.966.939,32	1	103.522.718,65	1	104.519.811,51	1	105.446.921,47	1	106.795.403,86		
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)				90.248.016,20		91.624.991,90		92.507.490,21		93.328.048,68		94.521.551,80		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terjaminnya Hak Anak	Persentase Kecamatan Layak Anak (%)	100	100	90.248.016,20	100	91.624.991,90	100	92.507.490,21	100	93.328.048,68	100	94.521.551,80	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				90.248.016,20		91.624.991,90		92.507.490,21		93.328.048,68		94.521.551,80		
Jumlah Lembaga PHA	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2	2	90.248.016,20	2	91.624.991,90	2	92.507.490,21	2	93.328.048,68	2	94.521.551,80		
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				90.248.016,20		91.624.991,90		92.507.490,21		93.328.048,68		94.521.551,80		
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2	2	90.248.016,20	2	91.624.991,90	2	92.507.490,21	2	93.328.048,68	2	94.521.551,80		
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan				0		0		0		0		0		
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK				63.000.151,64		63.961.388,04		64.577.440,67		65.150.254,46		65.983.412,69		
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Anak termasuk (per 10.000 anak) (Rasio)	3	8	63.000.151,64	8	63.961.388,04	8	64.577.440,67	8	65.150.254,46	8	65.983.412,69	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				26.992.500,00		27.544.000,00		28.801.200,00		34.211.440,00		41.241.728,00		
Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	1	26.992.500,00	1	27.544.000,00	1	28.801.200,00	1	34.211.440,00	1	41.241.728,00		
2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota				26.992.500,00		27.544.000,00		28.801.200,00		34.211.440,00		41.241.728,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	1	26.992.500,00	1	27.544.000,00	1	28.801.200,00	1	34.211.440,00	1	41.241.728,00		
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		
Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan				0		0		0		0		0		
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				36.007.651,64		36.417.388,04		35.776.240,67		30.938.814,46		24.741.684,69		
jumlah anak yang menerima layanan perlindungan khusus daerah kab/kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	1	36.007.651,64	1	36.417.388,04	1	35.776.240,67	1	30.938.814,46	1	24.741.684,69		
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai				36.007.651,64		36.417.388,04		35.776.240,67		30.938.814,46		24.741.684,69		
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	1	36.007.651,64	1	36.417.388,04	1	35.776.240,67	1	30.938.814,46	1	24.741.684,69		

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					2.674.293.938,38		2.715.097.469,99		2.741.248.292,87		2.765.563.669,81		2.800.930.410,28			
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					638.927.864,41		648.676.423,81		654.924.237,18		660.733.535,71		669.183.166,34			
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Masyarakat Adat Terpencil yang Meningkat Pendapatannya (%)	0	0	10	638.927.864,41	15	648.676.423,81	20	654.924.237,18	25	660.733.535,71	30	669.183.166,34	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
	Persentase Sumber daya Kesejahteraan yang Diberdayakan (%)	0	0	100		100		100		100		100				
1.06.02.2.01 - Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)					270.000.000,00		273.000.000,00		273.000.000,00		265.700.000,00		270.000.000,00			
Jumlah KAT yang diberdayakan	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	10	10	10	270.000.000,00	11	273.000.000,00	12	273.000.000,00	13	265.700.000,00	14	270.000.000,00			
1.06.02.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT					270.000.000,00		273.000.000,00		273.000.000,00		265.700.000,00		270.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	10	10	10	270.000.000,00	11	273.000.000,00	12	273.000.000,00	13	265.700.000,00	14	270.000.000,00			
1.06.02.2.02 - Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota					78.927.864,41		75.676.423,81		72.924.237,18		79.033.535,71		75.183.166,34			
Jumlah rekomendasi Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang diterbitkan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1	1	1	78.927.864,41	1	75.676.423,81	1	72.924.237,18	1	79.033.535,71	1	75.183.166,34			
1.06.02.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang					78.927.864,41		75.676.423,81		72.924.237,18		79.033.535,71		75.183.166,34		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	1	1	1	78.927.864,41	1	75.676.423,81	1	72.924.237,18	1	79.033.535,71	1	75.183.166,34			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.06.02.2.03 - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota					290.000.000,00		300.000.000,00		309.000.000,00		316.000.000,00		324.000.000,00			
Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0	0	3	290.000.000,00	3	300.000.000,00	4	309.000.000,00	4	316.000.000,00	5	324.000.000,00			
	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	10	10	3		3		4		4		5				
	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5	5	5		5		5		5		5				
	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	0	0	1		1		1		1		1				
1.06.02.2.03.0003 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000,00		51.000.000,00		52.000.000,00		46.000.000,00		46.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	10	10	3	50.000.000,00	3	51.000.000,00	4	52.000.000,00	4	46.000.000,00	5	46.000.000,00			
1.06.02.2.03.0004 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000,00		51.000.000,00		52.000.000,00		53.000.000,00		54.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	5	5	5	50.000.000,00	5	51.000.000,00	5	52.000.000,00	5	53.000.000,00	5	54.000.000,00			
1.06.02.2.03.0013 - Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota					90.000.000,00		95.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		KAB. NUNUKAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi (Lembaga)	0	0	1	90.000.000,00	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00			
1.06.02.2.03.0014 - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota					100.000.000,00		103.000.000,00		105.000.000,00		107.000.000,00		109.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0	0	3	100.000.000,00	3	103.000.000,00	4	105.000.000,00	4	107.000.000,00	5	109.000.000,00			
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					76.281.748,96		77.445.631,77		78.191.559,69		78.885.133,22		79.893.936,62			
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	100	0	100	76.281.748,96	100	77.445.631,77	50	78.191.559,69	100	78.885.133,22	100	79.893.936,62	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					76.281.748,96		77.445.631,77		78.191.559,69		78.885.133,22		79.893.936,62			
Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6	6	3	76.281.748,96	3	77.445.631,77	4	78.191.559,69	4	78.885.133,22	5	79.893.936,62			
1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal					76.281.748,96		77.445.631,77		78.191.559,69		78.885.133,22		79.893.936,62		KAB. NUNUKAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	6	6	3	76.281.748,96	3	77.445.631,77	4	78.191.559,69	4	78.885.133,22	5	79.893.936,62			
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					719.515.146,22		730.493.280,90		737.529.124,22		744.071.143,31		753.586.516,72			
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi PPKS (%)	70,2	0	90	719.515.146,22	95	730.493.280,90	95	737.529.124,22	95	744.071.143,31	100	753.586.516,72	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.06.04.2.01 - Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial					619.514.146,22		620.492.280,90		616.528.124,22		623.970.143,31		633.585.516,72			
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	78	12	12	619.514.146,22	12	620.492.280,90	13	616.528.124,22	13	623.970.143,31	13	633.585.516,72			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	31	19	19		20		21		22		23				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	460	55	55		55		55		55		55				
	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	2	7		7		8		8		9				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	382	60	60		60		62		62		64				
	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	37	20	20		21		22		23		24				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			20		25		30		35		40				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	60	60		65		70		75		80				
1.06.04.2.01.0001 - Penyediaan Permakanan					110.297.070,00		110.297.070,00		111.563.924,00		72.909.000,00		27.418.800,00		KAB. NUNUKAN	
Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	60	60	60	110.297.070,00	65	110.297.070,00	70	111.563.924,00	75	72.909.000,00	80	27.418.800,00			
1.06.04.2.01.0002 - Penyediaan Sandang					95.197.076,22		54.773.210,90		10.000.000,22		15.100.523,31		25.410.034,72		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)			20	95.197.076,22	25	54.773.210,90	30	10.000.000,22	35	15.100.523,31	40	25.410.034,72			
1.06.04.2.01.0003 - Penyediaan Alat Bantu					100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		130.100.000,00		146.410.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	31	19	19	100.000.000,00	20	110.000.000,00	21	115.000.000,00	22	130.100.000,00	23	146.410.000,00			
1.06.04.2.01.0008 - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar					64.000.000,00		70.400.000,00		77.440.000,00		85.184.000,00		93.702.400,00		Sebatik	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	78	12	12	64.000.000,00	12	70.400.000,00	13	77.440.000,00	13	85.184.000,00	13	93.702.400,00			
1.06.04.2.01.0009 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan					50.010.000,00		55.011.000,00		60.512.100,00		66.563.310,00		73.219.641,00		Sebatik	
Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	460	55	55	50.010.000,00	55	55.011.000,00	55	60.512.100,00	55	66.563.310,00	55	73.219.641,00			
1.06.04.2.01.0010 - Pemberian Layanan Kedaruratan					50.010.000,00		55.011.000,00		60.512.100,00		66.563.310,00		73.219.641,00		KAB. NUNUKAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	382	60	60	50.010.000,00	60	55.011.000,00	62	60.512.100,00	62	66.563.310,00	64	73.219.641,00			
1.06.04.2.01.0012 - Pemberian Layanan Rujukan					50.000.000,00		55.000.000,00		60.500.000,00		66.550.000,00		73.205.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	2	7	50.000.000,00	7	55.000.000,00	8	60.500.000,00	8	66.550.000,00	9	73.205.000,00			
1.06.04.2.01.0014 - Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		121.000.000,00		121.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	37	20	20	100.000.000,00	21	110.000.000,00	22	121.000.000,00	23	121.000.000,00	24	121.000.000,00			
1.06.04.2.02 - Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial					100.001.000,00		110.001.000,00		121.001.000,00		120.101.000,00		120.001.000,00			
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza diluar panti sosial yang memperoleh Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3	3	16	100.001.000,00	16	110.001.000,00	17	121.001.000,00	17	120.101.000,00	17	120.001.000,00			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	0	5		5		6		6		6				
1.06.04.2.02.0012 - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga					100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		120.100.000,00		120.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	0	5	100.000.000,00	5	110.000.000,00	6	121.000.000,00	6	120.100.000,00	6	120.000.000,00			
1.06.04.2.02.0013 - Pemberian Layanan Rujukan					1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	3	3	16	1.000,00	16	1.000,00	17	1.000,00	17	1.000,00	17	1.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					887.924.156,54		901.471.822,66		910.154.468,57		918.227.706,24		929.970.238,64			
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarkat Rentan	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Ditangani (%)	39,5	0	100	887.924.156,54	100	901.471.822,66	100	910.154.468,57	100	918.227.706,24	100	929.970.238,64	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar					237.344.000,00		264.939.400,00		291.433.340,00		320.576.674,00		352.634.341,00			
Jumlah anak terlantar yang ditangani	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	5	2	237.344.000,00	2	264.939.400,00	2	291.433.340,00	2	320.576.674,00	2	352.634.341,00			
	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2	30	6		6		6		6		6				
	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	4		4		4		4		4				
1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar					89.200.000,00		101.981.000,00		112.179.100,00		123.397.010,00		135.736.711,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	2	30	6	89.200.000,00	6	101.981.000,00	6	112.179.100,00	6	123.397.010,00	6	135.736.711,00			
1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar					48.152.000,00		52.967.200,00		58.263.920,00		64.090.312,00		70.499.343,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1	5	2	48.152.000,00	2	52.967.200,00	2	58.263.920,00	2	64.090.312,00	2	70.499.343,00			
1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar					99.992.000,00		109.991.200,00		120.990.320,00		133.089.352,00		146.398.287,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	4	99.992.000,00	4	109.991.200,00	4	120.990.320,00	4	133.089.352,00	4	146.398.287,00			
1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					650.580.156,54		636.532.422,66		618.721.128,57		597.651.032,24		577.335.897,64			
Jumlah data fakir miskin yang valid	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4	30	6	650.580.156,54	6	636.532.422,66	6	618.721.128,57	6	597.651.032,24	6	577.335.897,64			
	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	4.998	5.714	4.512		4.512		4.512		4.512		4.512				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	4.998	5.714	4.512		4.512		4.512		4.512		4.512			
	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5.050	6.091	5.050		5.050		5.050		5.050		5.050			
1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					375.228.606,54		338.645.717,66		296.045.752,57		247.708.119,24		197.398.692,64		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	4.998	5.714	4.512	375.228.606,54	4.512	338.645.717,66	4.512	296.045.752,57	4.512	247.708.119,24	4.512	197.398.692,64			
1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat					100.680.000,00		105.748.000,00		111.322.800,00		117.455.080,00		124.200.588,00		KAB. NUNUKAN	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4	30	6	100.680.000,00	6	105.748.000,00	6	111.322.800,00	6	117.455.080,00	6	124.200.588,00			
1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga					78.665.000,00		86.531.500,00		95.184.650,00		104.703.115,00		115.173.427,00		KAB. NUNUKAN	
Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5.050	6.091	5.050	78.665.000,00	5.050	86.531.500,00	5.050	95.184.650,00	5.050	104.703.115,00	5.050	115.173.427,00			
1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota					96.006.550,00		105.607.205,00		116.167.926,00		127.784.718,00		140.563.190,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan (Usulan)	4.998	5.714	4.512	96.006.550,00	4.512	105.607.205,00	4.512	116.167.926,00	4.512	127.784.718,00	4.512	140.563.190,00			
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					283.642.606,69		287.970.335,93		290.743.960,57		293.322.913,02		297.074.001,97			
Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	Meningkatya Perlindungan Sosial Korban Bencana (%)	17,8	0	100	283.642.606,69	100	287.970.335,93	100	290.743.960,57	100	293.322.913,02	100	297.074.001,97	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.06.06.2.01 - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota					121.000.000,00		110.000.000,00		95.000.000,00		79.000.000,00		61.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38	65	65	121.000.000,00	65	110.000.000,00	65	95.000.000,00	65	79.000.000,00	65	61.000.000,00			
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	48	5.987	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	141	495	140		140		140		140		140				
	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	4		4		4		4		4				
	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	109	5.987	1.500		1.500		1.500		1.500		1.500				
1.06.06.2.01.0001 - Penyediaan Makanan					80.000.000,00		90.000.000,00		60.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		Sebatik	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	48	5.987	1.500	80.000.000,00	1.500	90.000.000,00	1.500	60.000.000,00	1.500	20.000.000,00	1.500	25.000.000,00			
1.06.06.2.01.0002 - Penyediaan Sandang					15.000.000,00		5.000.000,00		20.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	109	5.987	1.500	15.000.000,00	1.500	5.000.000,00	1.500	20.000.000,00	1.500	5.000.000,00	1.500	10.000.000,00			
1.06.06.2.01.0004 - Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan					15.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		15.000.000,00		10.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	38	65	65	15.000.000,00	65	5.000.000,00	65	5.000.000,00	65	15.000.000,00	65	10.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.06.06.2.01.0005 - Pelayanan Dukungan Psikososial					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		20.000.000,00		10.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	141	495	140	5.000.000,00	140	5.000.000,00	140	5.000.000,00	140	20.000.000,00	140	10.000.000,00			
1.06.06.2.01.0007 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi					6.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		19.000.000,00		6.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	5	4	6.000.000,00	4	5.000.000,00	4	5.000.000,00	4	19.000.000,00	4	6.000.000,00			
1.06.06.2.02 - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota					162.642.606,69		177.970.335,93		195.743.960,57		214.322.913,02		236.074.001,97			
Jumlah Kampung Siaga Bencana yang di selenggarakan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	0	0	2	162.642.606,69	2	177.970.335,93	2	195.743.960,57	2	214.322.913,02	2	236.074.001,97			
Jumlah korban bencana alam dan Sosial yang ditangani					0		0		0		0		0			
Jumlah Kampung Siaga Bencana yang di selenggarakan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0	0	20	162.642.606,69	20	177.970.335,93	20	195.743.960,57	20	214.322.913,02	20	236.074.001,97			
	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	6		6		6		6		6				
1.06.06.2.02.0001 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana					99.998.591,00		109.998.450,00		120.998.295,00		133.098.125,00		146.407.937,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	0	0	2	99.998.591,00	2	109.998.450,00	2	120.998.295,00	2	133.098.125,00	2	146.407.937,00			
1.06.06.2.02.0002 - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana					59.990.115,69		65.989.185,93		72.588.065,57		79.846.888,02		87.831.564,97		KAB. NUNUKAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	6	59.990.115,69	6	65.989.185,93	6	72.588.065,57	6	79.846.888,02	6	87.831.564,97			
1.06.06.2.02.0003 - Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda					2.653.900,00		1.982.700,00		2.157.600,00		1.377.900,00		1.834.500,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya (Orang)	0	0	20	2.653.900,00	20	1.982.700,00	20	2.157.600,00	20	1.377.900,00	20	1.834.500,00			
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					68.002.415,56		69.039.974,92		69.704.942,64		70.323.238,31		71.222.549,99			
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Cakupan TMP yang terpelihara (%)	100	0	100	68.002.415,56	100	69.039.974,92	100	69.704.942,64	100	70.323.238,31	100	71.222.549,99	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
1.06.07.2.01 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					68.002.415,56		69.039.974,92		69.704.942,64		70.323.238,31		71.222.549,99			
Jumlah Kawasan Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	12	68.002.415,56	12	69.039.974,92	12	69.704.942,64	12	70.323.238,31	12	71.222.549,99			
	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	1	1		1		1		1		1				
1.06.07.2.01.0001 - Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					12.079.000,00		15.086.900,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	1	12.079.000,00	1	15.086.900,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00			
1.06.07.2.01.0002 - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					29.984.845,00		32.983.330,00		36.281.662,00		39.909.829,00		43.900.812,00		KAB. NUNUKAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	1	1	1	29.984.845,00	1	32.983.330,00	1	36.281.662,00	1	39.909.829,00	1	43.900.812,00			
1.06.07.2.01.0003 - Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota					25.938.570,56		20.969.744,92		18.423.280,64		15.413.409,31		12.321.737,99		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	12	25.938.570,56	12	20.969.744,92	12	18.423.280,64	12	15.413.409,31	12	12.321.737,99			
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					7.286.409.593,40		7.397.583.327,83		7.468.834.136,86		7.535.084.070,44		7.631.444.666,16			
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.741.665.482,08		6.844.527.683,05		6.910.451.662,96		6.971.748.641,22		7.060.905.158,39			
Meningkatnya dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di PD	Persentase tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam pelaksanaan administrasi perencanaan, keuangan, kepegawaian, aset, dan layanan penunjang lainnya (%)	100	100	100	6.741.665.482,08	100	6.844.527.683,05	100	6.910.451.662,96	100	6.971.748.641,22	100	7.060.905.158,39	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					60.000.000,00		54.527.000,00		100.451.662,00		82.900.000,00		78.905.158,00			
Jumlah dokumen perencanaan , penganggaran dan evaluasi kinerj yang disusun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	60.000.000,00	1	54.527.000,00	1	100.451.662,00	1	82.900.000,00	1	78.905.158,00			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	5		5		5		5		5				
2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					40.000.000,00		40.000.000,00		65.451.662,00		49.900.000,00		40.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	5	40.000.000,00	5	40.000.000,00	5	65.451.662,00	5	49.900.000,00	5	40.000.000,00			
2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					20.000.000,00		14.527.000,00		35.000.000,00		33.000.000,00		38.905.158,00		KAB. NUNUKAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	1	20.000.000,00	1	14.527.000,00	1	35.000.000,00	1	33.000.000,00	1	38.905.158,00			
2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.534.408.220,00		5.600.000.000,00		5.650.000.000,00		5.700.000.000,00		5.750.000.000,00			
Jumlah bulanan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	12	5.534.408.220,00	12	5.600.000.000,00	12	5.650.000.000,00	12	5.700.000.000,00	12	5.750.000.000,00			
2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					5.534.408.220,00		5.600.000.000,00		5.650.000.000,00		5.700.000.000,00		5.750.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	12	12	12	5.534.408.220,00	12	5.600.000.000,00	12	5.650.000.000,00	12	5.700.000.000,00	12	5.750.000.000,00			
2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					152.127.057,08		171.000.683,05		183.000.000,96		181.848.641,22		199.000.000,39			
jumlah unit kerja internal yang memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	152.127.057,08	1	171.000.683,05	1	183.000.000,96	1	181.848.641,22	1	199.000.000,39			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					99.988.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		120.000.000,00		125.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	99.988.000,00	1	110.000.000,00	1	115.000.000,00	1	120.000.000,00	1	125.000.000,00			
2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor					20.893.180,00		22.000.000,00		23.000.000,00		24.000.000,00		25.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1	20.893.180,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00	1	24.000.000,00	1	25.000.000,00			
2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					8.334.877,08		9.000.683,05		10.000.000,96		1.100.000,22		12.000.000,39		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	1	8.334.877,08	1	9.000.683,05	1	10.000.000,96	1	1.100.000,22	1	12.000.000,39			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					22.911.000,00		30.000.000,00		35.000.000,00		36.748.641,00		37.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	1	22.911.000,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	36.748.641,00	1	37.000.000,00			
2.08.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00			
jumlah barang milik daerah yang dibutuhkan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	5	50.000.000,00	5	55.000.000,00	5	60.000.000,00	5	65.000.000,00	5	70.000.000,00			
2.08.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	5	50.000.000,00	5	55.000.000,00	5	60.000.000,00	5	65.000.000,00	5	70.000.000,00			
2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					905.130.205,00		944.000.000,00		877.000.000,00		902.000.000,00		923.000.000,00			
Jumlah unit kerja internal yg memperoleh pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	905.130.205,00	1	944.000.000,00	1	877.000.000,00	1	902.000.000,00	1	923.000.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1		1		1		1		1				
2.08.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					8.172.525,00		9.000.000,00		17.000.000,00		22.000.000,00		23.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1	8.172.525,00	1	9.000.000,00	1	17.000.000,00	1	22.000.000,00	1	23.000.000,00			
2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					95.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	95.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	120.000.000,00	1	130.000.000,00			
2.08.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					7.200.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		KAB. NUNUKAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	7.200.000,00	1	35.000.000,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00			
2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					794.757.680,00		800.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1	794.757.680,00	1	800.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00	1	700.000.000,00			
2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					40.000.000,00		20.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00			
jumlah barang milik daerah yang dibutuhkan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	4	40.000.000,00	4	20.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1		1		1		1		1				
2.08.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					20.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	4	20.000.000,00	4	10.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00			
2.08.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					20.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	1	20.000.000,00	1	10.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00			
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					138.998.685,01		141.119.483,01		142.478.694,11		143.742.506,35		145.580.722,54			
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2,41	0	2,43	138.998.685,01	2,44	141.119.483,01	2,45	142.478.694,11	2,46	143.742.506,35	2,46	145.580.722,54	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota					113.998.685,01		116.119.483,01		117.478.694,11		118.742.506,35		120.580.722,54			
Jumlah Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	0	50	113.998.685,01	50	116.119.483,01	50	117.478.694,11	50	118.742.506,35	50	120.580.722,54			
	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1		1		1		1		1				
2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG					63.998.685,01		66.119.483,01		67.478.694,11		68.742.506,35		80.580.722,54		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	1	63.998.685,01	1	66.119.483,01	1	67.478.694,11	1	68.742.506,35	1	80.580.722,54			
2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		40.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)	0	0	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	50.000.000,00	50	40.000.000,00			
2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00			
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan yang Mendapat penguatan dan pengembangan	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00			
	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	25	25	30		30		30		30		30				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)	0	0	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00	6	25.000.000,00			
2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi					0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		KAB. NUNUKAN	
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	25	25	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00	30	0,00			
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					71.162.362,20		72.248.135,03		72.944.002,57		73.591.029,29		74.532.130,33			
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO per 10.000 Penduduk Perempuan (Rasio)	0	0	100	71.162.362,20	100	72.248.135,03	100	72.944.002,57	100	73.591.029,29	100	74.532.130,33	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					0		0		0		0		0			
Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan					0		0		0		0		0			
2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota					47.998.000,20		52.797.800,03		58.077.580,57		63.885.338,29		54.532.130,33			
Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	6	4	4	47.998.000,20	5	52.797.800,03	6	58.077.580,57	7	63.885.338,29	8	54.532.130,33			
2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota					47.998.000,20		52.797.800,03		58.077.580,57		63.885.338,29		54.532.130,33		KAB. NUNUKAN	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)	6	4	4	47.998.000,20	5	52.797.800,03	6	58.077.580,57	7	63.885.338,29	8	54.532.130,33			
2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					23.164.362,00		19.450.335,00		14.866.422,00		9.705.691,00		20.000.000,00			
Jumlah perempuan yang mendapatkan layanan rujukan lanjutan	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	0	0	25	23.164.362,00	30	19.450.335,00	35	14.866.422,00	40	9.705.691,00	45	20.000.000,00			
2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota					23.164.362,00		19.450.335,00		14.866.422,00		9.705.691,00		20.000.000,00		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)	0	0	25	23.164.362,00	30	19.450.335,00	35	14.866.422,00	40	9.705.691,00	45	20.000.000,00			
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					79.367.956,95		80.578.928,15		81.355.034,83		82.076.668,97		83.126.286,55			
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Tingkat Partisipasi Aggkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	75,53	0	75,56	79.367.956,95	75,57	80.578.928,15	75,58	81.355.034,83	75,59	82.076.668,97	75,59	83.126.286,55	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0		0		0		0		0			
Jumlah keluarga yang mendapatkan pelatihan dalam rangka meningktakan kualitas keluarganya					0		0		0		0		0			
2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota					79.367.956,95		80.578.928,15		81.355.034,83		82.076.668,97		83.126.286,55			
Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan penguatan dan pengembangan	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	0	5	79.367.956,95	5	80.578.928,15	5	81.355.034,83	5	82.076.668,97	5	83.126.286,55			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					79.367.956,95		80.578.928,15		81.355.034,83		82.076.668,97		83.126.286,55		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)	0	0	5	79.367.956,95	5	80.578.928,15	5	81.355.034,83	5	82.076.668,97	5	83.126.286,55			
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					101.966.939,32		103.522.718,65		104.519.811,51		105.446.921,47		106.795.403,86			
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan data Gender dan Anak Sebagai Dasar Perencanaan Pembangunan (%)	20	0	22	101.966.939,32	26	103.522.718,65	30	104.519.811,51	34	105.446.921,47	38	106.795.403,86	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					101.966.939,32		103.522.718,65		104.519.811,51		105.446.921,47		106.795.403,86			
Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki data gender dan anak	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	1	101.966.939,32	1	103.522.718,65	1	104.519.811,51	1	105.446.921,47	1	106.795.403,86			
2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota					101.966.939,32		103.522.718,65		104.519.811,51		105.446.921,47		106.795.403,86		KAB. NUNUKAN	
Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	1	101.966.939,32	1	103.522.718,65	1	104.519.811,51	1	105.446.921,47	1	106.795.403,86			
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					90.248.016,20		91.624.991,90		92.507.490,21		93.328.048,68		94.521.551,80			
Terjaminnya Hak Anak	Persentase Kecamatan Layak Anak (%)	100	0	100	90.248.016,20	100	91.624.991,90	100	92.507.490,21	100	93.328.048,68	100	94.521.551,80	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					90.248.016,20		91.624.991,90		92.507.490,21		93.328.048,68		94.521.551,80			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Jumlah Lembaga PHA	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2	2	2	90.248.016,20	2	91.624.991,90	2	92.507.490,21	2	93.328.048,68	2	94.521.551,80			
2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota					90.248.016,20		91.624.991,90		92.507.490,21		93.328.048,68		94.521.551,80		KAB. NUNUKAN	
Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)	2	2	2	90.248.016,20	2	91.624.991,90	2	92.507.490,21	2	93.328.048,68	2	94.521.551,80			
2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					0		0		0		0		0			
Jumlah Lembaga Penyedia Layanan					0		0		0		0		0			
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					63.000.151,64		63.961.388,04		64.577.440,67		65.150.254,46		65.983.412,69			
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan	Rasio Kekerasan Terhadap Anak termasuk (per 10.000 anak) (Rasio)	3	0	8	63.000.151,64	8	63.961.388,04	8	64.577.440,67	8	65.150.254,46	8	65.983.412,69	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					26.992.500,00		27.544.000,00		28.801.200,00		34.211.440,00		41.241.728,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*	*(16)*	*(17)*
Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	0	1	26.992.500,00	1	27.544.000,00	1	28.801.200,00	1	34.211.440,00	1	41.241.728,00			
2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota					26.992.500,00		27.544.000,00		28.801.200,00		34.211.440,00		41.241.728,00		KAB. NUNUKAN	
terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)	0	0	1	26.992.500,00	1	27.544.000,00	1	28.801.200,00	1	34.211.440,00	1	41.241.728,00			
2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					0		0		0		0		0			
Jumlah anak yang mendapatkan layanan pengaduan kekerasan					0		0		0		0		0			
2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					36.007.651,64		36.417.388,04		35.776.240,67		30.938.814,46		24.741.684,69			
jumlah anak yang menerima layanan perlindungan khusus daerah kab/kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	0	1	36.007.651,64	1	36.417.388,04	1	35.776.240,67	1	30.938.814,46	1	24.741.684,69			
2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai					36.007.651,64		36.417.388,04		35.776.240,67		30.938.814,46		24.741.684,69		KAB. NUNUKAN	
terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)	0	0	1	36.007.651,64	1	36.417.388,04	1	35.776.240,67	1	30.938.814,46	1	24.741.684,69			

TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.	1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	1.06.03.2.01 - Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
			1.06.03.2.01.0003 - Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	
2.	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarkat Rentan	1.06.05.2.01 - Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	
			1.06.05.2.01.0001 - Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	
			1.06.05.2.01.0002 - Rujukan Anak-Anak Terlantar	
			1.06.05.2.01.0003 - Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	
			1.06.05.2.02 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0001 - Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
			1.06.05.2.02.0004 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
			1.06.05.2.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
			1.06.05.2.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
3.	2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	
			2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	
			2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	
4.	2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	1.06.2.08.0.00.01.0000 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
2.	Persentase PPKS yang mendapatkan Pemberdayaan Sosial	%	40	43	46	49	52	55	58	
3.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	84,14	84,49	84,50	84,52	84,53	84,53	84,55	
4.	Persentase PPKS yang mendapatkan penanganan Rehabilitasi Sosial	%	94	95	96	97	98	99	99,1	
5.	Persentase Pelayanan dan Pendampingan Kekerasan Terhadap PerempuanÂ danÂ Anak	%	0	50	51	52	53	54	55	
6.	Persentase PPKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%	75	76	77	78	79	80	81	

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL										
2.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	positif	%	93,18	94	95	96	97	98	100	
3.	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana		Persentase	17,80	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	positif	%	100	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
5.	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	positif	Persentase	25	30	30	30	35	40	50	
6.	Persentase penanganan tanggap bencana darurat		%	15	30	30	50	50	50	50	
7.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	positif	%	98,46	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	
8.	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	positif	%	98,33	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	100	
9.	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK										
10.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		Indeks	0,362	0,359	0,348	0,337	0,326	0,315	0,304	
11.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Indeks	83,97	85,20	85,76	86,32	86,88	87,44	88,00	
12.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase ARG Daerah		%	2,41	2,42	2,43	2,44	2,45	2,46	2,46	
14.	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif		%	100	100	100	100	100	100	100	

kinerja dengan memberikan arah yang jelas, kerangka aksi, serta mekanisme evaluasi yang terukur.

Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, berikut ini dijelaskan uraian program pada Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan periode 2025–2029 sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Sosial
2) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
3) Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
4) Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
5) Program Rehabilitasi Sosial
6) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
7) Program Penanganan Bencana
8) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
9) Program Peningkatan Kualitas Keluarga
10) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak
11) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
12) Program Perlindungan Perempuan
13) Program Perlindungan Khusus Anak

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjadi pedoman bagi pembangunan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan lima tahun ke depan. Dokumen RENSTRA ini akan menjadi dokumen yang menerjemahkan Tujuan Perangkat Daerah dalam mendukung visi, misi Kepala Daerah. Keterpaduan langkah dalam mencapai tujuan, upaya-upaya yang akan dilakukan serta penentuan keterlibatan berbagai pihak serta pemangku kepentingan dijabarkan dalam dokumen RENSTRA ini.

Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Nunukan 2025-2029. Sebagai upaya mewujudkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan yang tercantum dalam RENSTRA, Maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan 2025-2029 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan;
2. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja–PD) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
3. Setiap Bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan agar melaksanakan program-program dalam RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
4. Setiap Bidang Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan berkewajiban menyusun Rencana Aksi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun dengan berpedoman pada RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
5. RENSTRA dan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan menjadi acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP);
6. Berkaitan dengan pelaksanaan RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan 2025-2029, setiap Bidang perlu memperkuat peran pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan 2025-2029, dan melakukan sosialisasi baik kepada aparat Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sipil;

7. Terhadap adanya perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029, maka RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan menyesuaiakan perubahan RPJMD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029;
8. Terhadap SOTKD baru yang dibentuk setelah RENSTRA ditetapkan, jika berimplikasi terhadap pelaksaan Tugas pokok dan fungsi, maka RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan 2025-2029 harus dilakukan perubahan;
9. Terhadap perubahan Nomenklatur program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, maka RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan 2025-2029 tidak perlu dilakukan perubahan, namun harus menyesuaikan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan 2025-2029;
10. Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang di luar kendali Pemerintah Kabupaten Nunukan yang diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan 2025-2029, maka strategi, arah kebijakan, program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat ditinjau kembali dalam proses pelaksanaannya.

Selanjutnya RENSTRA Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun program-program pembangunan tahun 2025-2029 serta bagi lembaga DPRD Kabupaten Nunukan dalam mengakomodasikan aspirasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2029. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nunukan bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RENSTRA dan Rencana Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang selaras, konsisten dan sesuai peraturan yang berlaku.

Nunukan, 13 Oktober 2025
Kepala Dinas,

Faridah Aryani, SE, M.A.P
Nip. 19681128 199103 2 005